



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1957

TENTANG

**MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN
VB DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Bagian VB dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 44 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 115), perlu diubah dan ditambah;
- Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian VB (kementerian Perekonomian) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 44 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 115), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB .1 (Pengeluaran)

5B.1. Kementerian dan pengeluaran umum,

ditambah dengan Rp. 2.919.800,-

5B.2. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5B.2.	Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri, ditambah dengan	Rp	33.900,-
5B.4.	Jawatan Perekonomian Umum, ditambah dengan	Rp.	4.600.000
5B.5.	Jawatan Koperasi, ditambah dengan	Rp.	4.580.000,-
5B.7.	Jawatan Perdagangan, ditambah dengan.....	Rp.	45.800,-
5B.9	Perkembangan Perindustrian, ditambah dengan	Rp	3.522.000,-
5B.10	Kantor Pusat Pembelian, ditambah dengan	Rp	8.000,-
5B.11	Statistik, ditambah dengan	Rp.	2.315.000,-
5B.12	Jawatan Tera, ditambah dengan	Rp.	53.900,-
SB.14	Kantor Penjualan Hasil Tambang Negara, ditambah dengan	Rp.	29.000,-
5B.15A	Jawatan Pertambangan (baru), ditambah dengan	Rp.	64.500,-
5B.I5B	Jawatan Geologi, ditambah dengan	Rp.	624.400,-
5B.18	Yayasan Urusan Bahan Makanan, ditambah dengan	Rp.	81.300,-
5B.19	Pengeluaran tak terduga, ditambah dengan	Rp.	2175400,-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 25 Maret 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan

pada tanggal 8 April 1957.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI PEREKONOMIAN,

ttd

BURHANUDDIN

LEMBARAN NEGARA NOMOR 30 TAHUN 1957